

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja sama antar negara-negara ASEAN telah melahirkan sebuah era baru yaitu *ASEAN Economic Community (AEC)* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA merupakan perdagangan atau pasar bebas bagi negara-negara di ASEAN yang memungkinkan masyarakat ASEAN bebas mencari pekerjaan bahkan melakukan perdagangan di negara-negara ASEAN. Oleh karena itu masyarakat ASEAN akan secara ketat bersaing dalam memperoleh pekerjaan dan bahkan menguasai dunia pasar. Kondisi ini telah mengharuskan masyarakat Indonesia untuk memiliki kualitas daya saing yang tinggi, karena jika tidak maka akan menjadi penonton di negeranya yang kaya akan sumber daya alam ini. Karena itu, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat diperlukan guna mempersiapkan masyarakat Indonesia menghadapi era MEA tersebut.

Peningkatan SDM tidak mungkin dapat berjalan tanpa adanya pembangunan di sektor pendidikan, dan hanya pendidikan dengan kualitas sangat baiklah yang akan mampu mengantarkan individu di suatu negara manapun bersaing dalam era MEA. Dengan demikian, pendidikan menjadi sentral dalam pembangunan, karena untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, harus melalui pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan indikator pendidikan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun *United Nations Development Programme (UNDP)*. Karena itu pendidikan dianggap sebagai investasi yang sangat berharga untuk pembangunan bangsa.

Dalam *Human Development Report (HDR)* 2016, UNDP mencatat IPM 2015 di Indonesia mencapai 68,9 dan masih berstatus pembangunan manusia “sedang”. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 113 di antara 188 negara di dunia. Sementara itu, di ASEAN Indonesia berada pada posisi

ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Dengan demikian, agar capaian IPM Indonesia dapat ditingkatkan, maka mutu pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam diri siswa. Dengan pendidikan bermutu, dapat menghasilkan tenaga-tenaga muda potensial yang tangguh dan siap bersaing dalam masyarakat global. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya adalah untuk mengaktualisasikan tiga dimensi kemanusiaan paling mendasar, yakni: afeksi, kognisi dan psikomotor. Mutu pendidikan yang diinginkan tidak akan tercipta begitu saja, tetapi harus direncanakan dengan matang, dan untuk meraihnya dibutuhkan pula pendekatan dan strategi pengelolaan yang baik serta kerja sama berbagai pihak.

Dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia sejak tahun 1999 melalui UU RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan UU RI Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah serta UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, telah dengan tegas mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam urusan pemerintahan. Pergeseran paradigma pemerintahan dari setralistik ke desentralistik tersebut mengakibatkan perubahan yang terjadi hampir pada seluruh aspek urusan pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk di bidang pendidikan. Pemerintah menyerahkan urusan kewenangan pemerintahan, khususnya urusan pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota), sedangkan pemerintah provinsi memiliki fungsi kordinatif. Penerapan desentralisasi sistem pendidikan nasional tersebut merupakan

bagian dari agenda demokratisasi dan desentralisasi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Upaya pemerintah ini dianggap sebagai langkah yang strategis guna meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah berharap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dengan lebih baik, yaitu melalui manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school community based management*) seperti yang termuat dalam Bab VII UU RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.

Dengan adanya perubahan sistem pendidikan nasional yang sentralistik menjadi desentralistik, maka pendidikan tidak lagi hanya menjadi urusan pemerintah tetapi juga menjadi urusan masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk berperan serta dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. (Pasal 8 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Bahkan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan (pasal 9). Hal ini menuntut pendekatan manajemen di sekolah yang lebih kondusif sehingga dapat mengakomodir pemberdayaan masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan sekolah.

Kehadiran sekolah di tengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, hubungan sekolah dan masyarakat mesti dibangun terus menerus dengan baik demi pemenuhan kebutuhan baik sekolah maupun masyarakat. Karena itu, sekolah harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar dapat memahami kebutuhan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan, karena jika hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dibangun dengan baik, maka masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab serta termotivasi untuk berpartisipasi memajukan sekolah.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat sangat penting dan harus diusahakan pengembangannya untuk tujuan dan kepentingan kedua lembaga tersebut, yaitu kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Purwanto M. Ngalim (2014) mengemukakan bahwa jika ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk: (a) Memelihara kelangsungan hidup sekolah; (b) Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; (c) Memperlancar proses belajar-mengajar; (d) Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperluaskan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah. Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat, tujuan hubungan dengan sekolah adalah: (a) Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual; (b) Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat; (c) Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat; (d) Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya. Dengan demikian, betapa penting dan perlunya sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam berbagai program kerja sekolah.

Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak mungkin akan berhasil secara optimal. Karena itu partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat dibutuhkan. Masyarakat harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui berbagai kegiatan seperti menyumbang tenaga, materi, gagasan, keahlian, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi serta memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak terbatas pada memberikan bantuan financial dan sarana prasarana, tetapi juga berkaitan dengan pengambilan keputusan, perencanaan dan penilaian program sekolah.

Partisipasi masyarakat yang sangat diperlukan itu tidak akan muncul dengan sendirinya, maka pihak sekolah harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta memberikan kesempatan atau peluang kepada mereka

untuk berpartisipasi. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai agen perubahan terhadap masyarakatnya, sekolah hendaknya selalu mengikutsertakan masyarakat agar pekerjaannya lebih efektif (Neagley, 1980 dalam Pidarta, 2011). Karena itu, kepala sekolah harus dapat membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat sehingga dapat pula menciptakan kesempatan atau peluang bagi partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah.

Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Dengan demikian, masyarakat harus dilibatkan secara nyata dalam berbagai kegiatan sekolah seperti perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2014), di 30 SD se kota Metro yang mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat melalui komite sekolah dan orangtua pada aspek perencanaan sudah berjalan secara aktif, namun keterlibatan pada aspek proses pembelajaran dan asesmen (penilaian) masih rendah. Dijelaskan pula bahwa faktor yang memengaruhi rendahnya keterlibatan komite sekolah dan orangtua dalam proses implementasi dan penilaian program sekolah adalah mereka (komite sekolah dan orangtua) merasa tidak cukup punya waktu dan kemampuan. Penelitian ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah sangat diperlukan.

Oleh karena sekolah mengalami kesulitan dalam proses pelibatan masyarakat yang begitu luas, pemerintah sejak tahun 2002 mengeluarkan kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) RI Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan

kemudian mengalami perubahan pada tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Regulasi-regulasi tersebut dikeluarkan dengan maksud memperkuat implementasi kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan, sekaligus menetapkan prosedur yang harus dilakukan dalam pelibatan masyarakat. Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam partisipasi peningkatan mutu pendidikan di sekolah melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah dilakukan melalui komite sekolah. Dengan kata lain, bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi “masyarakat” dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah adalah partisipasi “komite sekolah”.

Secara konseptual, masyarakat yang dimaksudkan dalam partisipasinya melalui komite sekolah terhadap pendidikan di sekolah tergambar dalam pasal 4 PERMENDIKBUD RI nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Bahwa anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang, dan terdiri atas unsur orangtua/wali siswa maksimal 50%, tokoh masyarakat maksimal 30% dan pakar pendidikan maksimal 30%. Dengan demikian, karena orangtua/wali siswa tidak secara menyeluruh menjadi anggota komite sekolah, maka selain diperlukannya partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, juga dibutuhkan partisipasi orangtua/wali secara personal guna mendukung berbagai program sekolah dan komite sekolah, terutama memenuhi kebutuhan anak dalam belajar di rumah maupun di sekolah.

Sejak bergulirnya KEPMENDIKNAS RI Nomor 044/U/2002, Dewan pendidikan dibentuk di tingkat propinsi dan kabupaten kota, sedangkan pada tingkat sekolah dibentuk komite sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan penyelenggaraan sekolah. Komite sekolah juga diharapkan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan sebagai mediator antara pemerintah, masyarakat dan sekolah. Komite sekolah terdiri

atas unsur orangtua/wali siswa yang masih aktif, tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, dan para pakar pendidikan. Komite sekolah berkedudukan di sekolah dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara gotong royong, demokratis, mandiri, professional, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsinya itu, komite sekolah bertugas untuk: (1) Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait dengan kebijakan dan program sekolah; Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain; (2) Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; (3) Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (4) Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. (PERMENDIKBUD RI Nomor 75 Tahun 2016).

Fenomena yang dapat dicermati selama ini memberikan gambaran bahwa model pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah pada umumnya masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik. Penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik atau paradigma *top-down* masih dirasakan menjadi kendala dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah karena sangat bersifat birokratis. Fenomena ini sangat berimplikasi pada sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada pada lini paling depan dalam organisasi pendidikan menjadi kurang berdaya, minim inisiatif, bergantung pada instansi dan birokrasi di atasnya, serta hanya menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya rutin tanpa kreatifitas dan inovasi.

Berbeda dengan fenomena yang digambarkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiratno (2016) di Sekolah Dasar Negeri Jeruk III Kecamatan

Bandar Kabupaten Pacitan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di SDN Jeruk III dilakukan melalui proses keterlibatan masyarakat mulai merencanakan, menetapkan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan melakukan evaluasi partisipatif; Sedangkan bentuk partisipasi masyarakat terhadap SDN Jeruk III sangat beragam, seperti: Partisipasi berbentuk finansial/material, bagi masyarakat atau orangtua siswa; partisipasi berbentuk ide-ide atau gagasan pemikiran, bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan dan memegang kebijakan di Pacitan; dan partisipasi berbentuk doa, bagi masyarakat dan orangtua siswa yang memiliki kepedulian secara moral terhadap SDN Jeruk III. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat beragam bentuk partisipasi masyarakat di SDN Jeruk III karena perbedaan kemampuan yang dimiliki, namun masyarakat telah berusaha untuk terlibat dan berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan di sekolah mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan sekolah.

Berdasarkan pengamatan penulis, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui Komite Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Fakfak masih harus ditingkatkan. Secara umum, bentuk partisipasi masyarakat melalui Komite Sekolah yang nampak hanya terbatas pada dukungan finansial serta program-program fisik seperti pengecatan gedung sekolah, perbaikan kursi dan meja belajar, itupun masih sangat minim. Komite Sekolah belum terlibat secara penuh dalam berbagai kegiatan sekolah terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Keberadaan Komite Sekolah di SD YPK Fakfak masih sebatas pemenuhan tuntutan regulasi atau hanya sebagai kelengkapan sekolah (bersifat institusional). Perannya belum terlihat sampai pada level fungsional seperti yang diharapkan.

Selain partisipasinya di Komite Sekolah, orangtua siswa itu sendiri memiliki peran yang strategis dalam pendidikan di sekolah. Orangtualah yang menyediakan dana, sarana dan prasarana sekolah, bahkan orangtua sangat

memengaruhi pilihan sekolah anak. Pendidikan moral anak sangat menentukan perkembangan pendidikannya di sekolah, sedangkan pertumbuhan dan perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh orangtua melalui pendidikan sosialisasi di rumah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan secara formal memiliki peranan penting dan strategis dalam pembinaan generasi muda, khususnya siswa pada jenjang pendidikan dasar, namun, orangtua merupakan pemberi pendidikan pertama dan utama yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan dan perkembangan pribadi siswa.

Pusat pendidikan yang pertama bagi anak adalah lingkungan keluarganya. Karena itu, pendidikan di lingkungan keluarga sangat strategis untuk memberikan pendidikan ke arah kecerdasan, budi pekerti atau kepribadiannya, serta persiapan hidup di masyarakat. Orangtua akan menjadi contoh bagi anak, karena anak biasanya akan menirukan apa saja yang dilakukan oleh orangtua. Jadi orangtua harus bisa memberikan keteladanan dan kebiasaan sehari-hari yang baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi anaknya. Keteladanan dan kebiasaan yang baik itu, sebaiknya diberikan oleh orangtua sejak dari kecil atau kanak-kanak karena hal itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Karena itu, sangat diperlukan agar hubungan kerjasama yang harmonis dapat terjalin antara sekolah dan orangtua siswa.

Salah satu hasil studi tentang efek situasi sosial masyarakat dan keluarga terhadap angka *drop-out* di sekolah menunjukkan angka *drop-out* di sekolah bukan hanya ditentukan oleh proses transformasi akademik yang dilakukan di lingkungan internal sekolah, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi budaya, status sosial ekonomi orangtua, dan interaksi komunikasi sosial di masyarakat. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa faktor utama yang potensial menyebabkan tingginya angka *drop-out* di sekolah antara lain, buruknya pola komunikasi antara siswa, guru, dan orangtua. (Tilleczek dkk, 2011 dalam Rahman, 2014). Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pihak sekolah dalam hal ini guru dengan orangtua dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sangat diperlukan.

Partisipasi orangtua/wali siswa di SD YPK Fakfak yang terlihat masih sebatas mengantar-jemput anak pergi dan pulang sekolah, menyiapkan sarana prasarana sekolah anak, memberikan sumbangan finansial dan tenaga untuk pembangunan fisik, serta menghadiri rapat dalam rangka penerimaan laporan pendidikan anak. Partisipasi lain yang diharapkan dari orangtua seperti memberikan gagasan dan ide melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah belum terlihat signifikan. Olehnya itu, upaya perbaikan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di SD YPK Fakfak dengan melibatkan masyarakat dalam hal ini komite sekolah dan orangtua siswa guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Partisipasi komite sekolah dan orangtua/wali siswa yang diharapkan tidak akan muncul dengan sendirinya, karena itu perlu untuk dimunculkan oleh pihak sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi dalam lembaga satuan pendidikan mesti mengusahakan agar partisipasi yang diharapkan dapat terwujud guna peningkatan mutu pendidikan sekolah. Membangun hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat dan orangtua/wali siswa menjadi salah satu kunci yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Selain itu, sekolah dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan masyarakat. Sedangkan dari segi penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kepala sekolah harus mampu melibatkan komite sekolah dan orangtua dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah.

Ada indikasi bahwa pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah SD YPK Fakfak dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah kurang membutuhkan partisipasi masyarakat, sehingga belum secara signifikan mengusahakannya. Hal ini nampak dari sebuah fenomena yang terjadi, dimana dalam waktu yang cukup lama, telah terjadi stagnasi dalam kepengurusan komite sekolah di SD YPK Fakfak yang disebabkan oleh anak dari beberapa pengurus termasuk ketua telah menyelesaikan studi di sekolah tersebut. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada bulan oktober 2013 dalam rapat pihak sekolah bersama orangtua siswa, disepakati untuk membentuk kepengurusan

komite sekolah yang baru. Kemudian dibentuklah kepengurusan yang baru secara aklamasi dalam rapat yang dipimpin kepala sekolah. Walau telah terbentuk, kepengurusan komite sekolah tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya karena legalitas formal dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah tidak diterbitkan oleh pihak sekolah. Selanjutnya dalam rapat pihak sekolah bersama orangtua siswa pada bulan juni 2016 barulah dibentuk kepengurusan komite sekolah yang baru periode 2016-2021, dan ditetapkan dengan SK Kepala Sekolah nomor 04/SD.YPK/FF/VI/2016, tanggal 30 Juni 2016.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan berbagai permasalahan yang diuraikan dalam belakang masalah yang ada, penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak dengan beberapa sub fokus penelitian antara lain:

- Partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak;
- Partisipasi orangtua/wali siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak; dan
- Usaha kepala sekolah dalam memberikan kesempatan atau peluang kepada komite sekolah dan orangtua/wali siswa untuk berpartisipasi meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak.

C. Perumusan Masalah

Dari fokus dan sub fokus penelitian yang ada, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang harus diteliti dan dijawab dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak?
2. Bagaimana partisipasi orangtua/wali siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak?

3. Bagaimana usaha kepala sekolah dalam memberikan kesempatan atau peluang kepada partisipasi komite sekolah dan orangtua/wali siswa di SD YPK Fakfak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Mendeskripsikan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak;
2. Mendeskripsikan partisipasi orangtua/wali siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD YPK Fakfak;
3. Mendeskripsikan usaha kepala sekolah dalam memberikan kesempatan atau peluang kepada partisipasi komite sekolah dan orangtua/wali siswa di SD YPK Fakfak.

E. Paradigma Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar paradigma bahwa *Output* sebuah lembaga pendidikan (sekolah) tidak akan bermutu tinggi tanpa keterlibatan masyarakat dan orangtua/wali siswa dalam penyelenggaraannya. Oleh karena itu, masyarakat dan orangtua/wali siswa sangat perlu berpartisipasi dalam setiap proses manajemen penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sebuah organisasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat dan sekolah sebagai representasi dari masyarakat untuk mewadahi seluruh peran serta masyarakat yang disebut komite sekolah, sedangkan secara khusus orangtua/wali siswa dapat berpartisipasi dengan cara mendukung partisipasi komite sekolah serta memenuhi seluruh kebutuhan belajar anak baik di sekolah maupun di rumah.

Pada sisi yang lain, disadari bahwa partisipasi komite sekolah dan partisipasi orangtua/wali siswa tidak akan muncul secara optimal dengan

sendirinya, oleh karena itu pihak sekolah terutama kepala sekolah sangat dituntut agar dapat mengusahakan terciptanya partisipasi komite sekolah. Usaha kepala sekolah tersebut dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan atau komunikasi yang baik dengan komite sekolah dan orangtua/wali siswa, melibatkan komite sekolah dan orangtua/wali siswa dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sekolah, menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan komite sekolah dan orangtua/wali siswa guna menumbuhkan rasa memiliki mereka terhadap sekolah.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui partisipasi komite sekolah dan orangtua/wali siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada kepala sekolah, komite sekolah dan orangtua/wali siswa serta *stakeholders* pendidikan yang lain terhadap pentingnya partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dan orangtua/wali siswa dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.